

The Influence Of Village Apparatus Competency And The Use Of Information Technology On The Accountability Of Village Fund Management In Paya Tusam Village

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Paya Tusam

M. Yogi Attoriq¹⁾; Junawan²⁾; Yunita Sari Rioni³⁾
^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi medan
Email: ¹⁾ attoriqmyogi@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [25 Maret 2026]
Revised [27 April 2026]
Accepted [30 April 2026]

KEYWORDS

Village Apparatus Competency, Information Technology, Accountability In Village Fund Management.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Paya Tusam. Penelitian dilatarbelakangi oleh meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa serta masih adanya keterbatasan kompetensi aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi keuangan desa. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear berganda, dengan data diperoleh melalui kuesioner terhadap aparatur Desa Paya Tusam. Variabel independen penelitian adalah kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi, sedangkan variabel dependen adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian diharapkan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kompetensi aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of village apparatus competency and information technology utilization on accountability in village fund management in Paya Tusam Village. The research is motivated by the increasing demands for transparency and accountability in village fund management, as well as the limitations in apparatus competency and information technology utilization in village financial administration. The study uses a quantitative approach with multiple linear regression methods, with data obtained through questionnaires to Paya Tusam Village apparatus. The independent variables of the study are village apparatus competency and information technology utilization, while the dependent variable is accountability in village fund management. The results of the study are expected to provide empirical evidence regarding the influence of apparatus competency and information technology utilization in improving accountability in village fund management and serve as evaluation material for the village government in realizing transparent and accountable financial governance.

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana desa merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan. Seiring dengan meningkatnya alokasi dana desa dari pemerintah pusat, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa juga semakin tinggi. Akuntabilitas pengelolaan dana desa mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Dalam praktiknya, pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi. Kompetensi aparatur desa berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas administrasi keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Aparatur yang memiliki kompetensi memadai mampu menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, sedangkan keterbatasan kompetensi dapat menyebabkan kesalahan administrasi dan rendahnya kualitas pertanggungjawaban keuangan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor strategis dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa.

Teknologi informasi dapat membantu proses pencatatan transaksi, pengolahan data, serta penyusunan laporan keuangan secara sistematis dan transparan. Namun, implementasi teknologi

informasi pada pemerintahan desa belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan kemampuan aparatur dan rendahnya pemanfaatan sistem informasi yang tersedia. Kondisi tersebut juga ditemukan di Desa Paya Tusam, dimana pengelolaan dana desa masih menghadapi kendala terkait kompetensi aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal sehingga berpotensi mempengaruhi tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Paya Tusam.

LANDASAN TEORI

Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan organisasi agar pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab

OECD (2015) menjelaskan bahwa GCG mencakup prinsip-prinsip fundamental seperti akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independensi, dan fairness. Dalam konteks sektor publik, prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ketika prinsip GCG diterapkan pada pengelolaan dana desa, maka setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penguat dalam implementasi GCG. Menurut penelitian Nugraha dan Pratama (2020), teknologi informasi meningkatkan transparansi, mempermudah proses administrasi, serta memperkecil risiko penyimpangan akibat pencatatan manual. Sistem informasi desa, jika digunakan secara optimal, mampu menyediakan data yang akurat dan real-time sehingga meningkatkan keterbukaan dan memudahkan masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa. Dengan demikian, teknologi informasi berfungsi sebagai enabler utama untuk memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dituntut dalam kerangka GCG

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas dalam sektor publik merupakan suatu konsep fundamental yang menekankan kewajiban penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan setiap tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat. Dalam perspektif administrasi publik, akuntabilitas mencerminkan sejauh mana pemerintah menjalankan amanah publik dengan transparan, jujur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mahmudi (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban entitas publik untuk menyajikan, melaporkan, dan menjelaskan seluruh aktivitas yang dilakukan kepada pihak yang memiliki legitimasi untuk menilai dan meminta pertanggungjawaban. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya berorientasi pada penyampaian laporan, tetapi juga mencakup integritas moral, kepatuhan ketentuan, serta kualitas proses administrasi.

Dengan demikian, akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan konsep multidimensional yang dipengaruhi oleh integritas aparatur, kompetensi teknis, kepatuhan regulasi, dukungan teknologi informasi, dan komitmen terhadap transparansi publik. Semua komponen tersebut menciptakan kerangka tata kelola yang menjadikan desa mampu mempertanggungjawabkan setiap rupiah dana yang dikelola. Dalam konteks penelitian ini, akuntabilitas dipandang sebagai variabel kunci yang menjadi indikator keberhasilan tata kelola keuangan desa serta menjadi tolok ukur utama bagi pemerintahan desa dalam mewujudkan pengelolaan dana yang efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi aparatur desa merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa. Konsep kompetensi secara umum merujuk pada kombinasi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas secara efektif. Menurut Widiyanto (2021), aparatur desa yang memiliki pengalaman lebih lama dalam pengelolaan keuangan cenderung mampu mengatasi persoalan administrasi secara lebih cepat dan tepat. Pengalaman memungkinkan aparatur memahami pola penggunaan anggaran, risiko kesalahan pencatatan, serta mekanisme audit yang dilakukan oleh pihak eksternal seperti inspektorat dan BPK. Tanpa pengalaman yang memadai, aparatur rentan melakukan error, terutama dalam proses penatausahaan dan penyusunan laporan. Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah integritas dan sikap profesional.



Dalam konteks penelitian ini, kompetensi dipandang sebagai variabel independen yang memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas akuntabilitas pengelolaan dana desa, terutama melalui penguasaan regulasi, keterampilan teknis, kemampuan digital, dan integritas aparatur.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan komponen penting dalam modernisasi tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Teknologi informasi tidak hanya berfungsi sebagai perangkat administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang mendorong transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Marlina et al. (2021) mendefinisikan teknologi informasi sebagai seluruh alat dan sistem berbasis digital yang mendukung kelancaran pengelolaan data dan administrasi pemerintahan desa. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat diselesaikan lebih efektif dan meminimalisir risiko kesalahan pencatatan maupun manipulasi data.

METODE PENELITIAN

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara bertahap, dimulai dari:

1. Statistik deskriptif, untuk menggambarkan karakteristik data melalui nilai mean, minimum, maksimum, dan standar deviasi.
 2. Uji asumsi klasik, yang meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.
 3. Analisis regresi linier berganda, untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
 4. Uji t, untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial.
 5. Uji F, untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.
- Seluruh tahapan analisis dilakukan secara sistematis sesuai dengan prosedur statistik yang disarankan oleh (Ghozali, 2016) dan (Sugiyono, 2018). Penelitian ini menggunakan IBM SPSS Statistics versi 23 sebagai perangkat lunak utama untuk pengolahan dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics**

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	16	7	20	27	23.44	1.632
Kompetensi Aparatur Desa	16	9	20	29	24.00	1.826
Pemanfaatan Teknologi Informasi	16	7	19	26	22.81	1.905
Valid N (listwise)	16					

Berdasarkan Hasil Uji Deskriptif diatas, dapat kita gambarkan distribusi data yang didapat oleh peneliti adalah:

1. Variable Y, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 23,44 dengan nilai minimum 20 dan maksimum 27, serta rentang (range) sebesar 7. Nilai simpangan baku (standard deviation) sebesar 1,632 menunjukkan bahwa data cenderung mengelompok di sekitar nilai rata-rata. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa pada objek penelitian relatif baik dan stabil, dengan variasi jawaban responden yang rendah.
2. Variable X1, Kompetensi Aparatur Desa menunjukkan nilai mean tertinggi dibandingkan variabel lainnya, yaitu sebesar 24,00, dengan nilai minimum 20 dan maksimum 29, serta rentang sebesar 9. Simpangan baku sebesar 1,826 mengindikasikan adanya variasi jawaban responden yang masih tergolong moderat. Secara empiris, hasil ini menggambarkan bahwa kompetensi aparatur desa berada pada kategori cukup tinggi, meskipun terdapat perbedaan tingkat kompetensi antarresponden.

- Variable X2, Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki nilai rata-rata sebesar 22,81, dengan nilai minimum 19 dan maksimum 26, serta rentang sebesar 7. Nilai standar deviasi sebesar 1,905 merupakan yang terbesar di antara ketiga variabel, yang menunjukkan bahwa tingkat variasi data relatif lebih tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi di desa belum sepenuhnya merata dan masih terdapat perbedaan tingkat penggunaan teknologi antaraparatur desa.

Hasil Uji Reabilitas

**Tabel 2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.695	6

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang disajikan pada tabel *Reliability Statistics*, diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,695 dengan jumlah item pernyataan sebanyak 6 item. Nilai Cronbach's Alpha tersebut berada di atas batas minimum reliabilitas yang dapat diterima, yaitu 0,60, sehingga instrumen pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dinyatakan reliabel

**Tabel 3 Kompetensi Aparatur Desa
Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.695	6

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel *Reliability Statistics*, diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,695 dengan jumlah item pernyataan sebanyak 6 item. Nilai tersebut berada di atas batas minimum reliabilitas yang dapat diterima, yaitu 0,60, sehingga instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel Kompetensi Aparatur Desa dinyatakan reliabel

**Tabel 4 Pemanfaatan Teknologi Informasi
Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.695	6

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang disajikan pada tabel *Reliability Statistics*, diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,695 dengan jumlah item pernyataan sebanyak 6 item. Nilai tersebut berada di atas batas minimum reliabilitas yang dapat diterima, yaitu 0,60, sehingga instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi dinyatakan reliabel

**Tabel 5 Kolmogorof Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

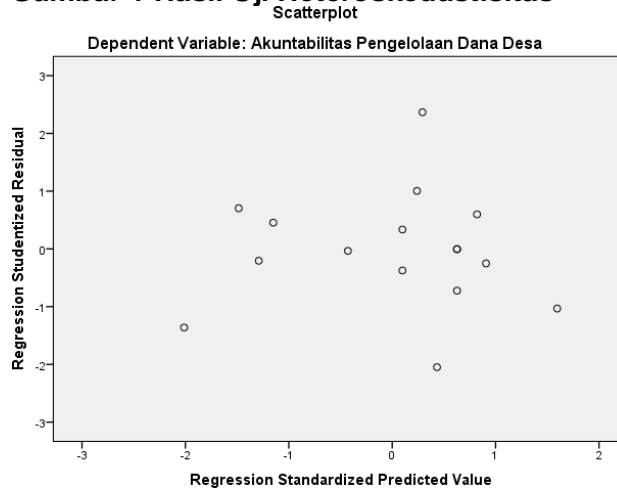
		Unstandardized Residual
N		16
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.35624572
Most Extreme Differences	Absolute	.127
	Positive	.127
	Negative	-.110
Test Statistic		.127
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.



Berdasarkan analisis menggunakan Kolmogorof Smirnov nilai Asymp Sig (2-Tailed) data penelitian berada di angka $0.200 > 0.05$. sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data penelitian berdistribusi normal.

Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan hasil uji diatas, grafik scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi keputusan berkunjung berdasarkan masukan variable independent daya tarik wisata, citra wisata dan promosi.

Tabel 6 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8.294	7.446		1.114	.286
Kompetensi Aparatur Desa	.176	.210	.197	.837	.418
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.479	.201	.559	2.380	.033

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Tabel 7 Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8.294	7.446		1.114	.286
Kompetensi Aparatur Desa	.176	.210	.197	.837	.418
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.479	.201	.559	2.380	.033

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil uji diatas, maka dapat ditarik Kesimpulan:

1. variabel Kompetensi Aparatur Desa memiliki nilai t-hitung sebesar 0,837, yang lebih kecil dibandingkan nilai t-tabel sebesar 2,144, serta nilai signifikansi sebesar 0,418, yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan dalam uji t, dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Aparatur Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial, kompetensi aparatur desa belum mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan akuntabilitas

- pengelolaan dana desa pada objek penelitian.
2. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki nilai t-hitung sebesar 2,380, yang lebih besar dibandingkan nilai t-tabel sebesar 2,144, serta nilai signifikansi sebesar 0,033, yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Tabel 8 Hasil Uji F

ANOVA ^a							
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	12.346	2	6.173	2.90	.090	
	Residual	27.591	13	2.122	9	b	
	Total	39.938	15				

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

b. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Desa

Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinan (Adjusted R²)Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.556 ^a	.309	.203	1.457

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi,

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi Aparatur Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan hasil uji t, variabel Kompetensi Aparatur Desa memiliki nilai t-hitung sebesar 0,837 lebih kecil dari t-tabel 2,144 dengan nilai signifikansi sebesar 0,418 (> 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial kompetensi aparatur desa belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil uji t menunjukkan nilai t-hitung sebesar 2,380 lebih besar dari t-tabel 2,144 dengan nilai signifikansi sebesar 0,033 (< 0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa semakin optimal pemanfaatan informasi teknologi, maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Kompetensi Aparatur Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,090 (>0,05), yang menunjukkan bahwa kedua variabel independen tersebut secara bersama-sama belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Saran

1. Pemerintah desa diharapkan dapat terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui penerapan prinsip transparansi, pertanggungjawaban, dan keterbukaan informasi publik. Penyusunan laporan keuangan desa perlu dilakukan secara tepat waktu, akurat, dan mudah dipahami, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.
2. Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Desa belum berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, peningkatan kompetensi aparatur desa tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah desa dan pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis pengelolaan keuangan



- desa, pemahaman regulasi, serta penguatan etika dan tanggung jawab aparatur desa dalam pengelolaan dana desa.
3. Mengingat Pemanfaatan Teknologi Informasi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa disarankan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, khususnya sistem informasi keuangan desa. Selain itu, diperlukan peningkatan kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan teknologi tersebut serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung agar pemanfaatan informasi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
 4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, seperti sistem pengendalian internal, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengawasan eksternal. Selain itu, penggunaan metode penelitian yang berbeda serta jumlah responden yang lebih besar diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan. (2020). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam perspektif tata kelola pemerintahan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arifin. (2019). Penerapan good governance dalam pengelolaan keuangan desa. Bandung: Alfabeta.
- Aswad, M., Rahman, A., & Putri, D.A. (2023). Pemanfaatan sistem informasi desa dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 8(2), 115–128.
- Komite Cadbury. (1992). Laporan komite aspek keuangan tata kelola perusahaan. London: Penerbitan Wah.
- Davis, FD (1989). Kegunaan yang dirasakan, kemudahan penggunaan yang dirasakan, dan penerimaan pengguna terhadap teknologi informasi. *MIS Triwulanan*, 13(3), 319–340.
- Enggar, R., Suryani, L., & Wibowo, A. (2020). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam perspektif sektor publik. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 5(1), 1–15.
- Fahurrohmi, I.N.A. (2022). Pengaruh kompetensi aparatur desa, peran perangkat desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Desa*, 4(2), 45–58.
- Faradila, N. (2022). Implementasi aplikasi keuangan desa dan dampaknya terhadap akuntabilitas. *Jurnal Sistem Informasi Publik*, 6(1), 67–79.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi analisis multivariat dengan program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, S. (2022). Literasi aparatur digital desa sebagai tantangan implementasi sistem informasi desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 23–35.
- Indraswari, NE, & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–16.
- Kuncahyo, H.D., & Dharmakarja, I.G.M.A. (2022). Pengaruh kompetensi, peran aparat desa, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(7), 2051–2064.
- Marlina, R., Yusuf, M., & Santoso, B. (2021). Teknologi informasi sebagai instrumen pendukung transparansi keuangan desa. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 3(2), 89–101.
- Mulyani. (2023). Kapasitas aparatur desa dalam menangani transformasi administrasi digital. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 7(1), 41–55.
- Nugraha, A., & Pratama, R. (2020). Sistem informasi desa dan transparansi pengelolaan dana publik. *Jurnal Teknologi Informasi Pemerintahan*, 2(1), 14–26.
- OECD. (2015). Prinsip tata kelola perusahaan G20/OECD. Paris: Penerbitan OECD. Permendagri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Putri, A., & Lestari, D. (2022). Hambatan implementasi sistem informasi desa dalam pelaporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 5(3), 201–214.
- Rahmawati. (2022). Transparansi informasi publik dan kepercayaan masyarakat desa. *Jurnal Administrasi Negara*, 10(2), 77–90.
- Sari, M., & Pramudito, A. (2021). Peran pelatihan teknologi informasi terhadap keberhasilan digitalisasi desa. *Jurnal Manajemen Publik*, 6(1), 55–68.
- Spencer, LM, & Spencer, SM (1993). Kompetensi di tempat kerja: Model untuk kinerja yang unggul. New York: John Wiley & Putra.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

- Zamzami. (2023). Infrastruktur jaringan internet dan efektivitas pelaporan keuangan desa. *Jurnal Sistem Informasi Desa*, 4(2), 98–110.
- Junawan. (2017). Analisis Efisiensi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pertumbuhan Wajib Pajak dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak
- Yunita Sari Rioni. (2025). Kepatuhan Dan Pemahaman Bendahara Desa Kepatuhan Mengenai Kewajiban Pajak Di Desa Kota Pari Sumatera Utara